

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penentuan proses alokasi anggaran mengacu pada laporan realisasi anggaran tahun sebelumnya dengan sedikit peningkatan pada jumlah anggran tanpa merubah jenis atau pos belanja. Pendekatan sistem anggaran disebut dengan anggaran berimbang dan dinamis *line-item and incremental budgeting*. Diantara faktor Pendukung pertumbuhan ekonomi suatu Daerah adalah tersedianya infrstruktur yang memadai. Tidak ada yang bisa dipungkiri bahwa peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah sangatlah penting. Dari berbagai fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan pengeluaran ekonomi daerah tersebut.

Oleh karena itu setiap daerah saat ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Menurut Indra Bastian (2001): Line-item anggaran yang didasarkan pada dan dari mana dana berasal (pos-pos penerimaan). Sedangkan incremental budgeting anggaran belanja dan pendapatan yang memungkinkan revisi selama satu tahun berjalan, sekaligus sebagai dasar penentuan usulan anggaran periode tahun yang akan datang.

Penyusunan APBN melewati proses perencanaan pengeluaran dan pemasukan negara. Penyusunan ini biasa disebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN.

Penelitian ini menggunakan data anggaran belanja modal dan belanja pemeliharaan tahun anggaran 2019-2021 pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 1.1
Realisasi Belanja Modal dan Belanja Pemeliharaan 2019-2021

No	Satuan Kerja	Belanja Modal			Belanja Pemeliharaan		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Kab. Malaka	68.000.000	0	0	26.175.000	26.175.000	35.125.000
2	Kab. Manggarai Timur	28.000.000			52.450.000	60.925.000	48.329.000
3	Kab. Sabu Raijua	36.000.000		30.000.000	31.700.000	31.700.000	26.155.700
4	Kantor Wilayah	580.500.000		363.497.000	761.214.000	957.110.000	638.810.000
5	Kab. Kupang	32.000.000	170.000.000	464.349.000	95.439.000	77.604.000	78.362.000
6	Kab. TTS	40.000.000		15.000.000	115.590.000	95.990.000	134.150.000
7	Kab. TTU	63.000.000	170.000.000	75.000.000	141.530.000	117.140.000	500.000.000
8	Kab. Belu	38.000.000		600.000.000	146.164.000	116.199.000	81.180.000
9	Kab. Alor	66.000.000		110.490.000	138.900.000	120.490.000	5.200.000
10	Kab. Sumba Timur	40.000.000			122.694.665	134.689.000	185.564.000
11	Kab/ Sumba Barat	90.000.000		30.000.000	128.600.000	131.600.000	90.800.000
12	Kab. Ende	67.000.000		111.000.000	152.290.000	125.950.000	60.700.000
13	Kab. Flores Timur	29.000.000		500.000.000	121.500.000	76.400.000	71.997.065
14	Kab. Ngada	54.000.000			128.150.000	128.150.000	128.187.000
15	Kab. Sikka	40.000.000	170.000.000	500.000.000	131.860.000	87.100.000	60.058.000
16	Kab. Manggarai	44.000.000			169.125.000	170.269.000	180.279.000
17	Kota Kupang	28.000.000		385.000.000	134.580.000	151.565.000	120.364.000
18	Kab. Lembata	40.000.000	170.000.000		137.500.000	125.000.000	101.900.000
19	Kab. Rote Ndao	60.000.000		100.000.000	155.700.000	160.300.000	145.850.000
20	Kab. Manggarai Barat	70.000.000		100.000.000	168.790.000	144.695.000	144.170.000
21	Kab. Nagekeo	48.000.000		150.000.000	100.000.000	100.000.000	98.880.000
22	Kab. Sumba Tengah	40.000.000		200.000.000	98.085.000	102.000.000	70.990.000
23	Kab. Sumba Barat Daya	165.000.000		110.000.000	124.225.000	117.000.000	104.405.000
	Total	1.766.500.000	680.000.000	3.838.622.000	3.382.301.665	3.358.976.000	311.456.265

Sumber : Dokumen Laporan Keuangan Kanwil Kemenag Prov. NTT

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat jumlah belanja modal Kantor Kementerian Agama se Provinsi Nusa Tenggara Timur di tahun 2019 sebesar Rp. 1.766.500.000,- tahun 2020 cuma empat (4) Satker yang mendapat alokasi belanja modal dikarena anggaran untuk belanja modal yang pada saat penetapan DIPA awal yang sudah dianggarkan direvisi dan dipindahkan dikembalikan ke Kas Negara untuk penanggulangan COVID-19 dengan total anggaran Rp. 850.000.000, dan tahun 2021 sebesar Rp. 3.838.622.000. Sedangkan belanja pemeliharaan di tahun 2019 sebesar Rp. 3.382.301.665, tahun 2020 belanja pemeliharaan sebesar Rp. 3.358.976.000 dan di tahun 2021 belanja pemeliharaan untuk Kantor Kementerian Agama se Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp. 3.111.456.265.

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa anggaran belanja modal di tahun 2019 mengalami kenaikan di tahun 2021 meskipun di tahun 2020 Cuma 4 (empat) Satuan Kerja mendapat alokasi belanja modal. Begitu pula anggaran untuk pemeliharaan pada tahun 2019 terjadi kenaikan di tahun 2020, hal ini disimpulkan bahwa ketika anggaran belanja modal bertambah ditahun berikutnya maka secara tidak langsung akan mempengaruhi juga bertambahnya anggaran pemeliharaan ditahun berikutnya. Hal ini didukung oleh penelitian Baihaqi dan Khotimah (2019) mengatakan bahwa ketika biaya modal tinggi, biaya pemeliharaan juga ikut meningkat, selain itu, Legianto (2015) menyatakan dalam hasil penelitiannya bahwa alokasi belanja modal memiliki konsekuensi peningkatan biaya pemeliharaan pada tahun anggaran berikutnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Karo-Karo (2006) memperoleh hasil bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan. Sedangkan

Sukry (2008) menemukan hasil bahwa belanja modal berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan. Penelitian Abdullah (2008) ,menemukan bukti bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap belanja pemeliharaan pada tahun yang sama di daerah Jawa,tetapi untuk daerah luar Jawa mempunyai pengaruh pada tahun yang sama. Sedangkan pada tahun yang berbeda belanja modal mempunyai korelasi yang kuat baik di daerah Jawa maupun luar Jawa.

Menguji pengaruh signifikan antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data anggaran dua tahun berikutnya yaitu belanja modal dan belanja pemeliharaan mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 pada Kantor Kementerian Agama se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Belanja Modal terhadap Belanja Pemeliharaan Kementerian Agama se Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebelum dan Selama Covid”.

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan pemaparan atas masalah dan dasar dilakukan penelitian ini, maka dapat ditarik rumusan masalahnya yaitu :

1. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap belanja pemeliharaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Se Provinsi Nusa Tenggara Timur ?
2. Berapa besar pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Se Provinsi Nusa Tenggara Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Timur
2. Untuk mengetahui besar pengaruh belanja modal terhadap belanja pemeliharaan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan kontribusi empiris untuk memperkuat penelitian sebelumnya, terkait adanya pengaruh antara belanja modal dengan belanja pemeliharaan pada Kantor Kementerian Agama se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman mengenai keterkaitan antara belanja modal dan belanja pemeliharaan.